

ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY AUDIT* ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2007-2011

I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, Wayan Cipta

Jurusan Manajemen
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: shak_tha@yahoo.co.id, yc9eda@yahoo.co.id, cipta1959@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut PAD. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan menggunakan metode dokumentasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Kata kunci: kinerja keuangan

Abstract

This research aims to know the performance of the Department Pendapatan Daerah Buleleng regency based on the value for money which is a public sector organization management concept based on three main elements, namely: (1) economic, (2) efficiency, and (3) effectiveness. This research is descriptive quantitative research that is focused on performance in collecting revenue. The data collected in this study is quantitative data, using the methods of documentation were then analyzed descriptively. The results showed that the performance of the Revenue Office Buleleng fiscal year 2007-2011 in total are in the category of very good, but when seen from the average ratio of: (1) the economy is at a very economical criteria, (2) efficiency is at criteria is quite efficient, and (3) the effectiveness of the criteria are highly effective.

Keywords : financial performance

PENDAHULUAN

Reformasi muncul akibat adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia. Menurut Tomyagami (dalam Badrika, 2006) Salah satu unsur reformasi total itu adalah pemberian otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten dan kota secara proporsional, sehingga muncul sistem desentralisasi bagi pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia

dilaksanakan setelah gerakan reformasi tepatnya pada tahun 1999 Undang-Undang otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang ini, terjadi perubahan yang besar terhadap

struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga diikuti pula dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya digantikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Anonim, 2004). Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Buleleng akan memberikan kebebasan setiap daerah atau Kabupaten untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan rakyat khususnya daerah. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya mencerminkan bahwa kinerja suatu daerah juga tinggi sesuai dengan hasil yang dicapai.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, PAD merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Otonomi daerah diberlakukan untuk setiap kabupaten/ Kota secara nasional di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah/ kabupaten didalam meningkatkan dan mengolah pendapatan daerahnya. PAD yang tinggi seharusnya menghasilkan kinerja yang tinggi dalam proses pencapaian PAD tersebut, khususnya dilihat dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitasnya. Selama ini setiap daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah selalu mengalami fluktuasi dalam memperoleh target yang telah ditetapkan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sudah berusaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar realisasi yang diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009: 7) "*Tujuan value for money audit* adalah untuk meningkatkan akuntabilitaa lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah". Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng belum menerapkan *value for money audit* didalam mengukur tingkat pencapaian atas kinerjanya. Untuk itu, dengan menerapkan *value for money audit* diharapkan dapat diketahui apakah kinerja dari Dispenda Kabupaten Buleleng pada tahun 2007-2012 sudah memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Mahsun (2006: 179) menyatakan "fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik". Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi (Halim, 2004). Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas (Halim, 2002).

Selama ini setiap daerah khususnya Dispenda selalu mengalami fluktuasi dalam memperoleh target yang telah ditetapkan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sudah berusaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar realisasi yang diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng hanya menilai kinerjanya

berdasarkan tingkat pencapaian yang maksimal dari target yang telah ditetapkan dan belum menerapkan *value for money audit*. Dispenda sudah mengukur tingkat kinerjanya dengan sistem tingkat pencapaian yang maksimal tetapi tidak berdasarkan sistem *value for money audit*, dengan menggunakan sistem ini, Dispenda tidak hanya dapat mengukur besarnya biaya barang dan jasa, tetapi dengan menggunakan *value for money* Dispenda juga dapat memperhitungkan kualitas penggunaan sumber daya, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk dapat menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kinerja Dispenda berdasarkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang manajemen keuangan. Selain hal tersebut, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal perbaikan kinerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik dimasa mendatang guna meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bastian (2001: 329) menyatakan "kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dalam suatu organisasi". Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2005) bahwa, kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Whittaker (dalam Bastian, 2010), pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut. (1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, (2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3) Mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Simamora (2009) menyatakan, pengertian penilaian kinerja sebagai berikut. Penilaian kinerja memiliki beberapa pengertian (1) suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat, dan (2) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kerja individu.

Menurut Stout (dalam Bastian, 2001), pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen yang merupakan proses mencatat dan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi perusahaan melalui hasil-hasil yang ditampilkan baik berupa produk, jasa maupun proses. Melalui penilaian kinerja akan diketahui kemampuan kerja karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi-organisasi sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2009: 122) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: (1) Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (2) Mengukur

kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi (3) Mengakomodasi kan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk pencapaian *good governance* (4) Alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Erlendsson (2002) menggambarkan 'Nilai untuk uang' (*value for money*) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah keseluruhan itu merupakan nilai yang baik.

Barnett (2010) menyatakan,

Value for money audit adalah tolok ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) yang meliputi tiga elemen penting yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Mardiasmo (2009: 179) menyatakan,

Value for money audit adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas pelaksanaan suatu program atau kegiatan dan unit kerja tertentu.

(1) Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tahap yang terendah. (2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (3) Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka secara umum *value for money audit* adalah istilah yang digunakan untuk menilai dan memeriksa anggaran belanja pada tiga elemen penting yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada suatu perusahaan.

"Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya" (Mahsun, 2006: 179). Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup ekonomis
60%-80%	Kurang ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak ekonomis

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Halim (2004: 164) mendefinisikan efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi. Hal itu berarti bahwa rasio menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria efisiensi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%-keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Selain hal tersebut juga, Halim (2007: 234) menyatakan "rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan". Kriteria efektivitas sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%-keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yaitu: (1) Wulandari (2012) memperoleh hasil penelitian bahwa secara umum kinerja pada Dispenda Kabupaten Tabanan sudah optimal. Dapat dilihat dari rasio ekonomisnya telah memenuhi kriteria sangat ekonomis, dilihat dari rasio efisiensi telah memenuhi kriteria sangat efisien, dan dilihat dari rasio efektivitasnya sudah sangat efektif, dan (2) Ariasih (2009) memperoleh hasil penelitian yaitu: secara

umum kinerja pada Dispenda Kabupaten Gianyar sudah optimal. Dapat dilihat dari rasio ekonomisnya sudah tergolong ekonomis, dilihat dari rasio efisien sudah tergolong sangat efisien, dan dilihat dari rasio efektivitasnya tergolong sudah sangat efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan objeknya adalah kinerja keuangan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari laporan target dan realisasi PAD serta biaya yang dikeluarkan. Data yang dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen kemudian data dianalisis secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif Kinerja Keuangan

No.	Elemen Kinerja	Rata-rata		Skala	Kategori Total
		Rasio	Kategori		
1	Ekonomi	124,85%	Sangat Ekonomis	5	
2	Efisiensi	86,86%	Cukup Efisien	3	
3	Efektivitas	136,45%	Sangat Efektivitas	5	
		Rata-rata Total		4,33	Sangat Baik

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa secara total kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berada pada kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena pada rasio ekonomi berada pada kategori sangat ekonomis, rasio efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan pada rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektivitas. Dilihat dari masing-masing rasio, kinerja Dispenda ditinjau dari rasio ekonomi berada pada kategori sangat ekonomis, hal ini disebabkan karena realisasi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya. Pada rasio efisiensi berada pada kategori cukup efisien, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang terus mengalami peningkatan sehingga melampaui realisasi biaya. Pada rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, hal ini berarti bahwa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sudah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Analisis kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng secara keseluruhan sangat baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari (2012) hasil penelitian ini adalah secara umum kinerja Dispenda Kabupaten Tabanan dalam mengelola keuangannya sangat baik.

Dilihat dari masing-masing rasio yaitu rasio ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis. Temuan ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tinggi, karena telah memenuhi kriteria dan rasio ekonomi menunjukkan nilai diatas 100%, artinya Dispenda sudah memperhatikan kinerja dan tergolong sangat ekonomis. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dispenda telah dapat mengelola kegiatannya dengan baik yaitu dari sudut ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Halim (2002) yang menyatakan biaya terendah yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya maka akan mempengaruhi kinerja secara ekonomi perusahaan, artinya semakin besar anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan maka rasio ekonominya semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) yaitu rasio ekonomi PAD sangat ekonomis karena nilai rasio berada diatas 100%. Dilihat dari penelitian Ariasih (2009) rasio ekonomi yaitu tergolong ekonomis karena rasio ekonominya berada diatas 90%.

Pada rasio efisiensi berada pada kriteria cukup efisien. Dispenda

Kabupaten Buleleng belum menggunakan sumber dana yang ada untuk memenuhi kriteria efisiensi. Secara teoritis akan berbanding terbalik jika dilihat dari teori efisiensi. Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya sehingga tidak terjadi pemborosan disetiap program karena dipaksakan untuk dihabiskan anggarannya. Realisasi biaya dari sudut efisiensi membuktikan bahwa Dispenda belum melakukan efisiensi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori menurut McDonald & Lowton (dalam Ratmiko & Winarsih, 2009: 174) yang menyatakan suatu keadaan yang efisien akan tercapai apabila perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) dan Ariasih (2009) dengan hasil rasio efisiensinya yang tergolong sangat efisien. Diharapkan untuk Dispenda lebih memperhatikan belanja daerah yang seharusnya tidak melampaui pendapatan daerah agar nantinya penggunaan keuangan daerah dapat dipergunakan lebih efisien.

Pada rasio efektifitas berada pada kriteria sangat efektif. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011 persentase efektifitas tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk setiap tahun persentase efektifitas tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Ini berarti Dispenda telah berhasil mencapai tujuan. Hasil dari penelitian sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) dan Ariasih (2009) yaitu dengan hasil rasio efektifitasnya tergolong sangat efektif karena rasio efektifitasnya berada diatas 100%. Ini menandakan kinerja Dispenda dari sudut efektifitas terus meningkat karena para aparaturnya telah berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan PAD baik melalui pajak maupun retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih besar dari target yang

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dispenda dapat mengelola tingkat efektifitasnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2002) yang meyakini bahwa efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Kemudian teori efektifitas menurut McDonald & Lowton (dalam Ratmiko & Winarsih, 2009: 174) menyatakan bahwa tercapainya suatu tujuan apabila target, sasaran, maupun misi yang ditetapkan telah tercapai. Semakin besar kontribusi output (keluaran), maka semakin efektif proses kerja organisasi.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektifitas berada pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan kepada: (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng hendaknya dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif. Sehingga kedepannya mampu mempertahankan kinerjanya secara ekonomis di masa yang akan datang, dan (2) Penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng disarankan menggunakan *value for money audit* karena dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan metode yang selama ini diterapkan yaitu jumlah maksimal yang dipungut.

Daftar Rujukan

- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Ariasih, Ni Made. 2009. *Value For Money dan Analisis Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Atas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran*

- pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007-2009.*
- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah Ilmu Alam 3*. Jakarta: Erlangga.
- Barnett, Christ. 2010. *Measuring the Impact and Value For Money of Governance & Conflict Programmes*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga Yogyakarta: Erlangga.
- Depdagri. 1991. Kepmendagri No. 690.900.327, 1996. *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat.
- , 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bulak Sumur: UPP.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Manalu, Lia. 2010. Definisi Kinerja Dan Pengukuran Kinerja Akuntansi Sektor Publik. <http://liamanalu.blogspot.com/2010/02/definisi-kinerja-dan-pengukuran-kinerja.html>.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. ANDI.
- , 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- , 1993. *Akuntansi Keuangan Dasar Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmiko & Atik Septi Winrsih. 2009. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Simamora, Henry. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat.
- Wulandari. 2012. *Penilaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Berdasarkan Value For Money Audit tahun 2009-2012*.